



**KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT  
DIREKTORAT JENDERAL BINA MARGA**

**PROSEDUR  
PEMBINAAN PENYUSUNAN PROGRAM  
DAN ANGGARAN PENYELENGGARAAN JALAN  
SOP/UPM/DJBM-27**

Disahkan di Jakarta pada tanggal 01 Februari 2017

DIREKTUR JENDERAL BINA MARGA

**ARIE SETIADI MOERWANTO**  
**NIP : 195801251986031001**

Nomor Salinan

Status Dokumen



Nomor Dokumen	: SOP/UPM/DJBM-27	Tanggal Berlaku	: 01 Februari 2017
Nomor Revisi	: 00	Halaman	: 1 dari 8

## 1. TUJUAN

Prosedur ini dibuat sebagai panduan dalam pelaksanaan pembinaan penyusunan program dan anggaran penyelenggaraan jalan di Lingkungan Direktorat Pengembangan Jaringan Jalan, Direktorat Jenderal Bina Marga.

## 2. RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Prosedur Pembinaan Penyusunan Program dan Anggaran Penyelenggaraan Jalan ini meliputi :

- Pembinaan penyusunan program penyelenggaraan jalan melalui konsultasi dan sosialisasi kebijakan (Penyusunan RKA-K/L).
- Pembinaan penyusunan program penyelenggaraan jalan melalui konsultasi dan sosialisasi kebijakan (Penyusunan POK).
- Menyusun kriteria penyusunan program dan anggaran penyelenggaraan jalan.
- Persiapan bahan perumusan prioritas program.

## 3. REFERENSI

- Undang Undang RI Nomor 19 Tahun 2008, tentang Surat Berharga Syariah Negara.
- Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2011, tentang Pembiayaan Proyek Melalui Penerbitan Surat Berharga Syariah Negara.
- Peraturan Menteri Keuangan No 143/PMK.02/2015, tentang Petunjuk Penyusunan dan Penelaahan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga dan Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran.
- Peraturan Menteri Keuangan Nomor 238/PMK.02/2015, tentang Tata Cara Pengajuan Persetujuan Kontrak Tahun Jamak (*Multi Years Contract*) dalam Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Kepada Menteri Keuangan.
- Peraturan Menteri Keuangan Nomor 15/PMK.02/2016, tentang Tata Cara Revisi Anggaran Tahun Anggaran 2016.
- Peraturan Menteri 04/PRT/M/2009 tentang Sistem Manajemen Mutu di Departemen Pekerjaan Umum.
- Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 15/PRT/M/2015, tentang Organisasi dan Tata Kerja kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat.
- Instruksi Menteri Pekerjaan Umum Nomor 03/IN/M/2013, tentang Penyusunan dan Penelitian Rencana Kerja dan Anggaran (RKA-K/L) di Kementerian Pekerjaan Umum.

Nomor Dokumen	: SOP/UPM/DJBM-27	Tanggal Berlaku	: 01 Februari 2017
Nomor Revisi	: 00	Halaman	: 2 dari 8

3.9 Manual Sistem Terintegrasi (Mutu, Keselamatan dan Kesehatan Kerja dan Lingkungan) Direktorat Jenderal Bina Marga, MMK3L/DJBM/2016 tanggal 01 Juli 2016 Rev.00.

#### 4. DEFINISI

- 4.1 Arah Kebijakan : Penjabaran urusan pemerintahan dan/atau prioritas pembangunan sesuai dengan visi dan misi Presiden yang rumusannya mencerminkan bidang urusan tertentu dalam pemerintahan yang menjadi tanggungjawab Kementerian/Lembaga, berisi satu atau beberapa program untuk mencapai sasaran strategik penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan dengan indikator kinerja yang terukur.  
(Peraturan Menteri Keuangan Nomor 94/PMK.02/2013)
- 4.2 Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) : Dokumen pelaksanaan anggaran yang disusun oleh Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran.  
(Peraturan Menteri Keuangan Nomor 94/PMK.02/2013)
- 4.3 Penyelenggaraan Jalan : Kegiatan yang meliputi pengaturan, pembinaan, pembangunan, dan pengawasan jalan.  
(Peraturan Menteri Keuangan Nomor 94/PMK.02/2013)
- 4.4 Petunjuk Operasional Kegiatan (POK) : Dokumen yang memuat uraian rencana kegiatan dan biaya yang diperlukan untuk pelaksanaan kegiatan, disusun oleh Kuasa Pengguna Anggaran sebagai penjabaran lebih lanjut dari DIPA.
- 4.5 Program : Penjabaran dari kebijakan sesuai dengan visi dan misi Kementerian/Lembaga yang rumusannya mencerminkan tugas dan fungsi unit eselon I atau unit Kementerian/Lembaga yang berisi kegiatan untuk mencapai hasil dengan Indikator Kinerja yang terukur.  
(Peraturan Menteri Keuangan Nomor 94/PMK.02/2013)
- 4.6 Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga (RKA-KL) : Dokumen perencanaan dan penganggaran yang berisi program dan kegiatan suatu Kementerian Negara/Lembaga dan sebagai penjabaran dari Rencana Kerja Pemerintah dan Rencana Kerja Kementerian Negara/Lembaga yang bersangkutan dalam satu tahun anggaran serta anggaran yang diperlukan untuk melaksanakannya.  
(Peraturan Menteri Keuangan Nomor 94/PMK.02/2013)

Nomor Dokumen	: SOP/UPM/DJBM-27	Tanggal Berlaku	: 01 Februari 2017
Nomor Revisi	: 00	Halaman	: 3 dari 8

## 5. KETENTUAN UMUM

Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 15/PRT/M/2015, tentang Organisasi dan Tata Kerja kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat.

### Pasal 344

Subdirektorat Pemrograman mempunyai tugas melaksanakan pembinaan dan penyusunan sistem pemrograman penyelenggaraan jalan nasional.

### Pasal 345

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada pasal 344, Subdirektorat Pemrograman menyelenggarakan fungsi:

- a. Pembinaan penyusunan program dan anggaran penyelenggaraan jalan;
- b. Penyusunan program dan anggaran tahunan penyelenggaraan jalan nasional;
- c. Penyusunan dokumen anggaran tahunan;
- d. Pelaksanaan pengendalian anggaran tahunan; dan
- e. Pelaksanaan pemantauan dan evaluasi penyusunan program dan anggaran.

### Pasal 346

Subdirektorat Pemrograman terdiri atas:

- a. Seksi Pemrograman I; dan
- b. Seksi Pemrograman II

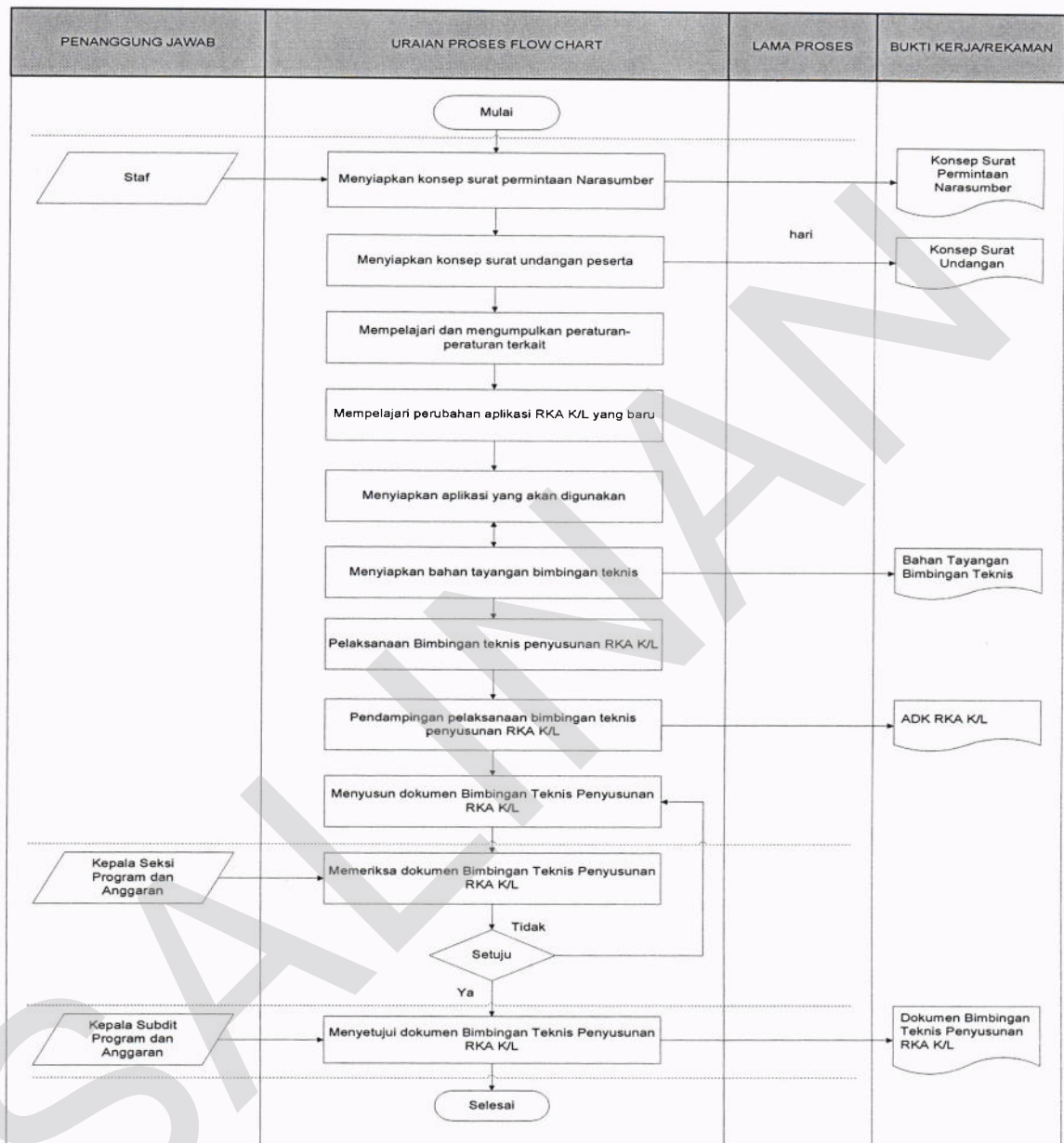
### Pasal 347

- 1) Seksi Pemrograman I mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan pembinaan penyusunan program dan anggaran penyelenggaraan jalan, penyusunan program dan anggaran tahunan penyelenggaraan jalan nasional, penyusunan dokumen anggaran tahunan, pelaksanaan pengendalian anggaran tahunan, pelaksanaan pemantauan dan evaluasi penyusunan program dan anggaran yang meliputi wilayah Sumatera, Jawa dan Kalimantan.
- 2) Seksi Pemrograman II mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan pembinaan penyusunan program dan anggaran penyelenggaraan jalan, penyusunan program dan anggaran tahunan penyelenggaraan jalan nasional, penyusunan dokumen anggaran tahunan, pelaksanaan pengendalian anggaran tahunan, pelaksanaan pemantauan dan evaluasi penyusunan program dan anggaran yang meliputi wilayah Bali, NTB, NTT, Sulawesi, Maluku dan Papua.

Nomor Dokumen	: SOP/UPM/DJBM-27	Tanggal Berlaku	: 01 Februari 2017
Nomor Revisi	: 00	Halaman	: 4 dari 8

## 6. RINCIAN PROSEDUR

### 6.1 Pembinaan Penyusunan Program Penyelenggaraan Jalan Melalui Konsultasi dan Sosialisasi Kebijakan (Penyusunan RKA-K/L)

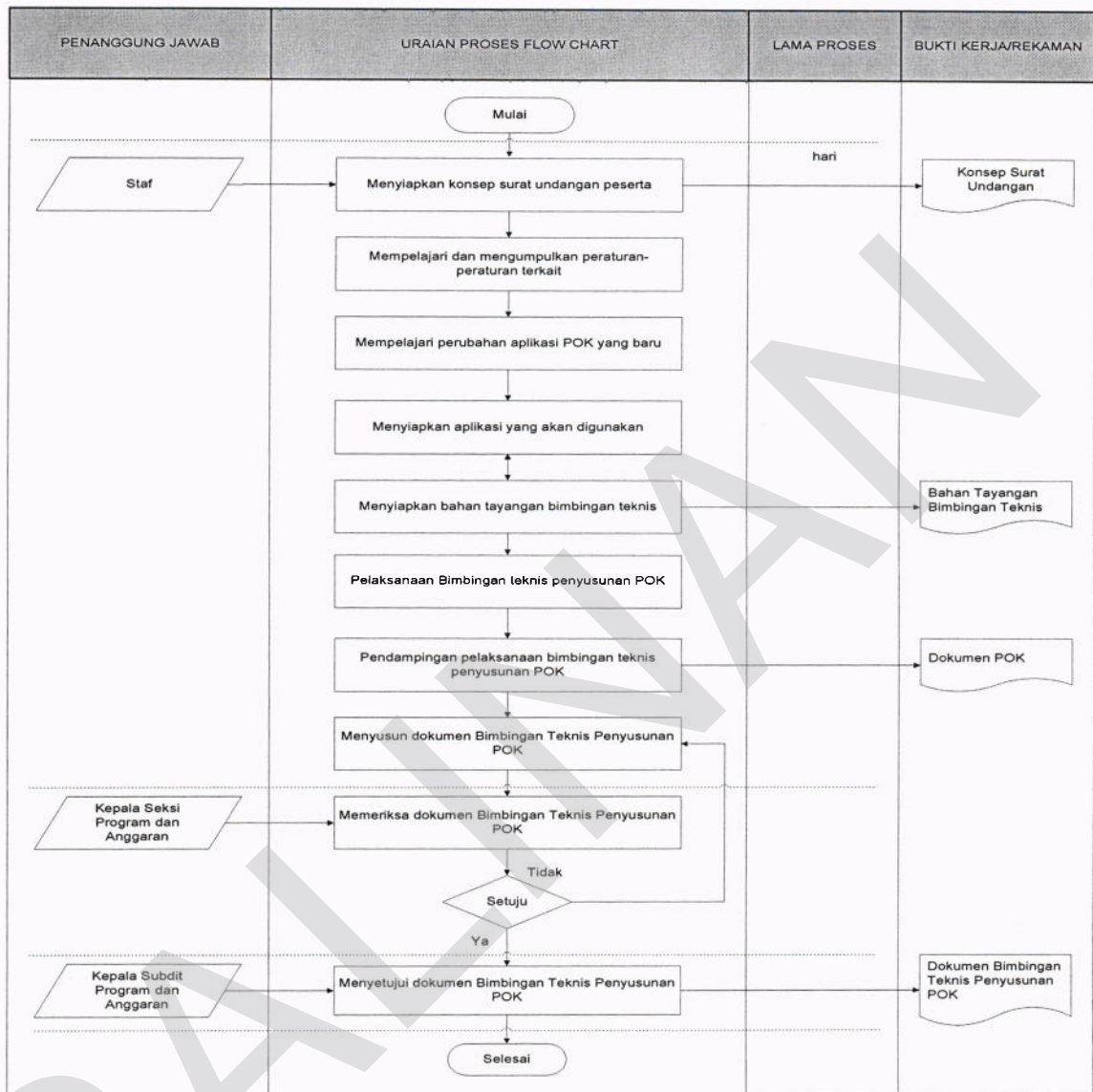


Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh isi dokumen tanpa ijin tertulis dari  
Direktorat Jenderal Bina Marga, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat



Nomor Dokumen	: SOP/UPM/DJBM-27	Tanggal Berlaku	: 01 Februari 2017
Nomor Revisi	: 00	Halaman	: 5 dari 8

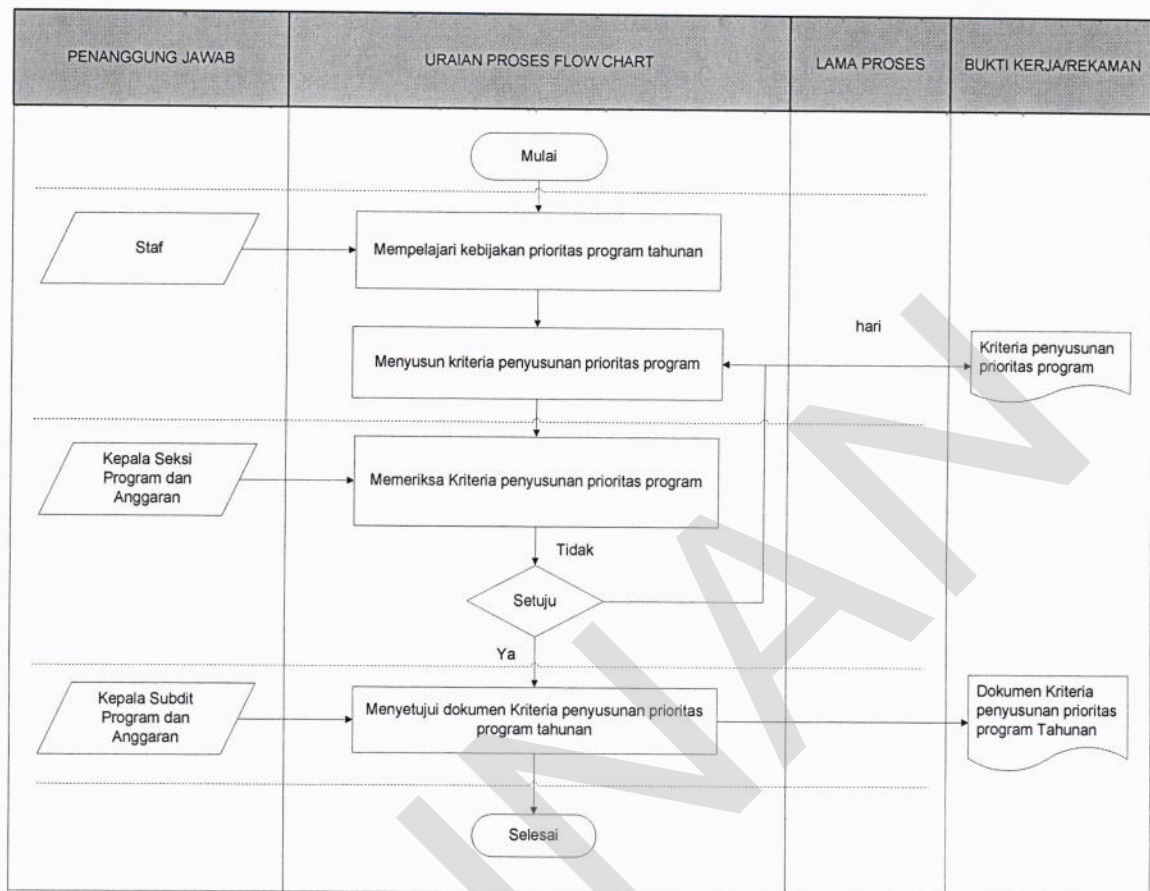
## 6.2 Pembinaan Penyusunan Program Penyelenggaraan Jalan Melalui Konsultasi dan Sosialisasi Kebijakan (Penyusunan POK).



Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh isi dokumen tanpa ijin tertulis dari  
Direktorat Jenderal Bina Marga, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat

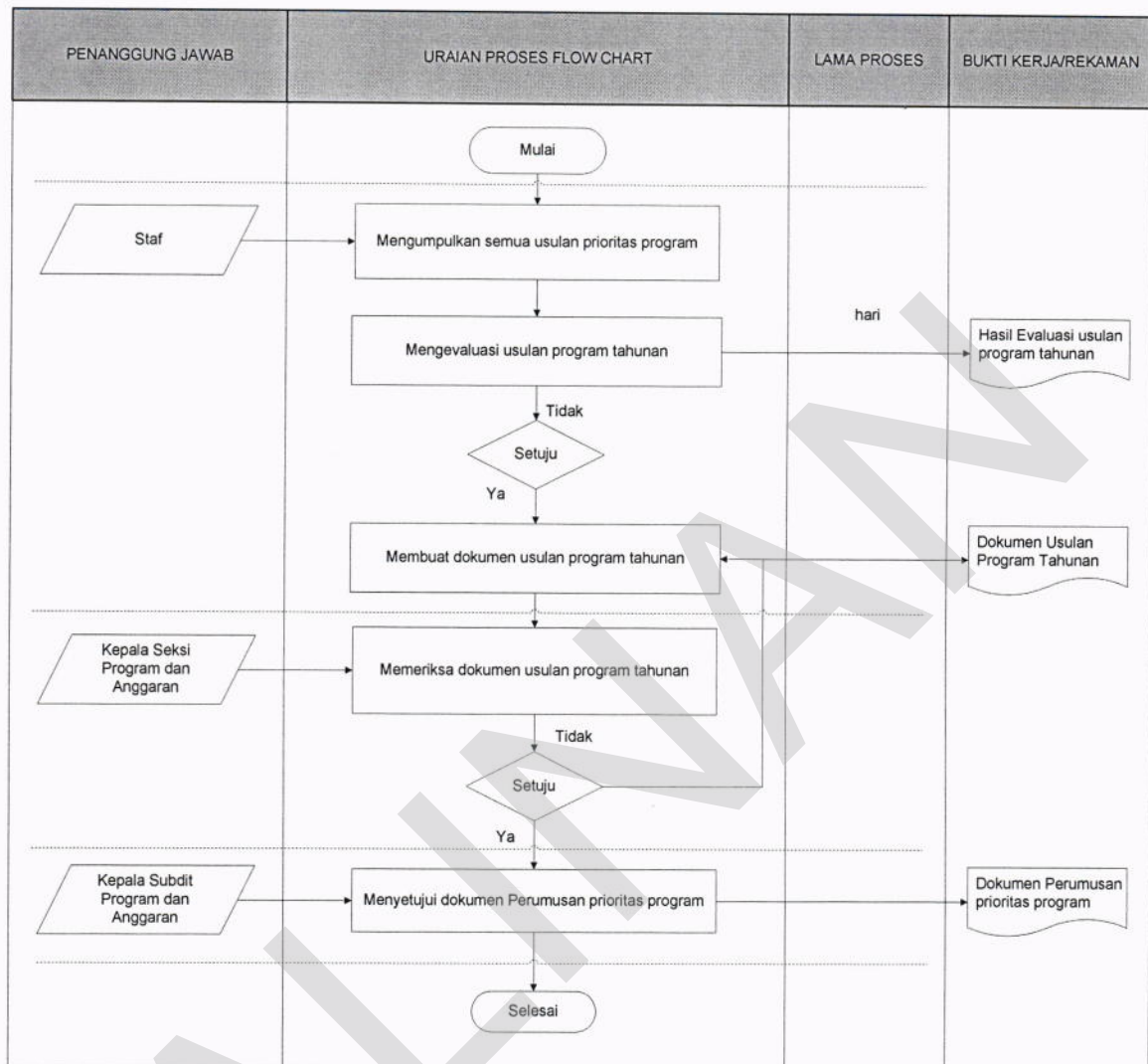
Nomor Dokumen	: SOP/UPM/DJBM-27	Tanggal Berlaku	: 01 Februari 2017
Nomor Revisi	: 00	Halaman	: 6 dari 8

### 6.3 Menyusun Kriteria Penyusunan Program dan Anggaran Penyelenggaraan Jalan



Nomor Dokumen	: SOP/UPM/DJBM-27	Tanggal Berlaku	: 01 Februari 2017
Nomor Revisi	: 00	Halaman	: 7 dari 8

#### 6.4 Persiapan Bahan Perumusan Prioritas Program



Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh isi dokumen tanpa ijin tertulis dari  
Direktorat Jenderal Bina Marga, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat



Nomor Dokumen	: SOP/UPM/DJBM-27	Tanggal Berlaku	: 01 Februari 2017
Nomor Revisi	: 00	Halaman	: 8 dari 8

## 7. FORMULIR

Tidak ada.

SALINAN

Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh isi dokumen tanpa ijin tertulis dari  
Direktorat Jenderal Bina Marga, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat